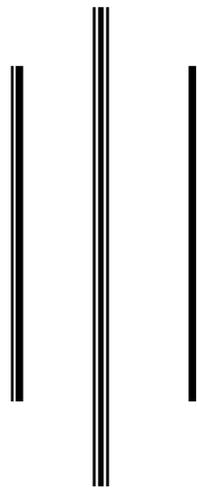




**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN
TA 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Angayu bagia kami aturkan kehadan Ida Sang Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Maha Esa), karena atas asung kerta waranugrahanya, kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) OPD Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan amanat Pemerintah melalui Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan media pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya berdasarkan Rencana Strategi yang sudah ditetapkan.

Dengan berbagai keterbatasan yang ada, disadari LKjIP Tahun 2023 ini masih banyak kekurangannya. Untuk itu koreksi yang sifatnya konstruktif terhadap mutu baik substansi maupun penyajian LKjIP ini sangat kami harapkan. Sehingga kinerja OPD Kesehatan Kabupaten Tabanan secara bertahap dapat mewujudkan visi dan misinya untuk kepentingan masyarakat.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2023 pada Dinas Kesehatan Kabupaten.

Tabanan, 22 Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Tabanan



dr. Ida Bagus Surya Wira Andi, S.Ked

Pembina, IV/a

NIP. 19840327 201001 1 032

DAFTAR ISI

Contents

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR BAGAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	1
1.3 Landasan Hukum.....	2
1.4 Analisis Aspek Strategis.....	4
1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia.....	4
1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan.....	5
1.4.3 Aspek Pembiayaan Kesehatan.....	5
1.4.4 Aspek Wilayah.....	5
1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Dinas Kesehatan.....	6
1.6 Isu-isu Strategis.....	11
1.7 Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja.....	31
3.1.1 Penetapan Kinerja.....	31
3.1.2 Pengumpulan Data Kinerja.....	31
3.1.3 Metode/Cara Pengukuran Kinerja.....	32
3.2 Capaian Kinerja Organisasi.....	33
3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya Dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 s/d 2026.....	35
3.2.2 Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi.....	36
3.2.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	38
3.2.4 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).....	39
3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama 2022.....	56
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2022.....	57
BAB IV PENUTUP.....	65
4.1 Kesimpulan.....	65
4.2 Saran.....	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi pegawai menurut Jenis kepegawaian dan golongan Tahun 2023.....	4
Tabel 1.2 Distribusi Pegawai Menurut Jenis Pendidikan Tahun 2023	4
Tabel 1.3 Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2023.....	5
Tabel 1.4 Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023.....	5
Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2023	15
Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Dinas Kesehatan Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2023.....	16
Tabel 2.3 Sasaran, Indikator, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	20
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya.....	34
Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023	43
Tabel 3.3 Capaian IKU berdasarkan RPJMD 2021-2026.....	56
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun 2023.....	58

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi PD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.....	7
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terukur dan legitimate merupakan sebuah syarat terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pengembangan tersebut dapat terwujud apabila seluruh OPD mampu menyusun perencanaan dan melaporkan hasil pekerjaan dengan baik dan terukur yang disusun menjadi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 53 Tahun 2014. Adapun dasar-dasar terselenggaranya “Good Governance” yaitu Tap MPR RI No. XI/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang - Undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, serta Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Azas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi beserta kewenangan pengolahan sumber daya dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran. Dalam rangka pemenuhan prinsip akuntabilitas kinerja tersebut, Dinas Kesehatan menyusun LKjIP tahun 2023. Laporan Kinerja Dinas Kesehatan merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat. Informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efisien, efektif dan responsif terhadap masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuannya yaitu mempertanggungjawabkan kinerja/pencapaian tujuan dan sasaran OPD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder) guna mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.3 Landasan Hukum

LKjIP Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

- (1). Landasan Idiil yaitu Pancasila,
- (2). Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,
- (3). Landasan Operasional :
 - a. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 - b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - e. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- g. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 3);
 - n. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 12 tahun 2008, Tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Tabanan.
 - o. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008, tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kabupaten Tabanan

1.4 Analisis Aspek Strategis

Aspek strategis adalah aspek yang mendukung dan merupakan sumber daya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas kesehatan Kabupaten Tabanan, aspek-aspek tersebut antara lain :

1.4.1 Aspek Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data bulan Desember 2023 jumlah pegawai yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan termasuk Puskesmas adalah 1265 orang yang terdiri dari 782 orang ASN dan 483 orang pegawai kontrak.

Tabel 1.1

Distribusi pegawai menurut Jenis kepegawaian dan golongan Tahun 2023

Jenis Kelamin	Kontrak	ASN	Jumlah
Laki laki	129	170	299
Perempuan	354	612	966
Jumlah	483	782	1265

Sumber : Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Tahun 2023

Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Berikut merupakan distribusi pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan menurut Jenis Jabatan fungsional :

Tabel 1.2 Distribusi pegawai menurut Jenis Fungsional Tahun 2023

No	Jenis Fungsional	Jumlah
1	Dokter Umum	75
2	Dokter Gigi	36
3	Apoteker	11
4	Administrator Kesehatan	19
5	Epidemiolog Kesehatan	7
6	Penyuluh Kesehatan	11
7	Bidan	276
8	Perawat	169
9	Perawat Gigi	55
10	Pranata Laboratorium Kesehatan	14
11	Sanitarian	31
12	Ahli Gizi	32
13	Asisten Apoteker	31
14	Perekam Medis	2
15	Teknisi Elektromedis	1
Jumlah		720

Sumber : Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, Tahun 2023

1.4.2 Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Berikut merupakan sarana yang tersedia di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan :

Tabel 1.3

Jenis dan Jumlah Sarana Kesehatan Di Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
1	RUMAH SAKIT UMUM	8
2	PUSKESMAS RAWAT INAP	5
3	PUSKESMAS NON RAWAT INAP	15
4	PUSKESMAS KELILING	25
5	PUSKESMAS PEMBANTU	77
6	POSKEDES	88
7	POLINDES	8
8	KLINIK PRATAMA	12
9	BANK DARAH RUMAH SAKIT	-
10	UNIT TRANSFUSI DARAH	1
JUMLAH		239

Sumber : Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan, Kabupaten Tabanan Tahun 2023

1.4.3 Aspek Pembiayaan Kesehatan

Anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 adalah Rp. 226.133.312.866,00 nilai tersebut sudah termasuk belanja operasi dan belanja modal pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan.

Tabel 1.4

Alokasi Pembiayaan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

No	Sumber Dana	Alokasi Anggaran	
		Rupiah	(%)
1	APBD Kabupaten Tabanan		
	a. Belanja Operasi	221.358.965.341,00	97,89%
	b. Belanja Modal	4.774.347.525,00	2,11%
T		226.133.312.866,00	100,00%

Sumber : Sub.Bag Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

1.4.4 Aspek Wilayah

Secara geografis Kabupaten Tabanan berada pada posisi 08^o14'30" sampai 08^o38'07" Lintang Selatan dan 114^o54'52" sampai 115^o12'57" Bujur Timur. Wilayah ini cukup strategis karena berdekatan dengan Ibu Kabupaten Tabanan Provinsi Bali yang hanya berjarak sekitar 25 Km dengan waktu tempuh ± 45 menit dan dilalui oleh jalur arteri yaitu jalur antar propinsi. Secara administratif Kabupaten Tabanan terbagi atas 10 kecamatan dan 133

desa. Sepuluh Kecamatan yang dimaksud adalah Tabanan, Kerambitan, Selemadeg, Selemadeg Barat, Selemadeg Timur, Pupuan, Penebel, Marga, Baturiti, dan Kediri.

Luas Kabupaten Tabanan adalah 839,33 km² atau sekitar 14,90 % dari luas Propinsi Bali (5.632,86 km²). Berdasarkan besarnya wilayah, maka Kabupaten Tabanan termasuk kabupaten terbesar kedua di Provinsi Bali setelah Kabupaten Buleleng.

Keadaan topografi Kabupaten Tabanan dapat digambarkan dengan adanya dataran tinggi di bagian utara wilayah Tabanan, dan dataran rendah di bagian selatannya. Kabupaten Tabanan bagian utara merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian tertinggi berada pada puncak Gunung Batukaru, yaitu 2.276 meter dari permukaan laut, dan di bagian selatan Kabupaten Tabanan merupakan daerah pantai yang berupa dataran rendah.

Bila dilihat dari penguasaan tanahnya, dari luas wilayah yang ada, sekitar 62,455 Ha (74,41%) wilayah Kabupaten Tabanan merupakan lahan pertanian, yang terdiri dari lahan sawah sebesar 22.184 Ha (26,43 %) dan 40,271 Ha (47,98%) merupakan lahan pertanian bukan sawah, yang sebagian besar berupa perkebunan, tegal, hutan rakyat, dan lainnya (tambak, kolam, empang, dll). Sedangkan 25,59 % lahan lainnya di Kabupaten Tabanan merupakan lahan bukan pertanian, seperti jalan, pemukiman, perkantoran, sungai dan lain-lain.

Luasnya Kabupaten Tabanan juga didukung dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar baik Puskesmas, Puskemas Pembantu maupun Poskesdes. Pada tahun 2023 terdapat 20 Puskesmas yang tersebar di masing-masing kecamatan di Kabupaten Tabanan. Ke-20 Puskesmas juga didukung dengan adanya 77 buah Puskesmas Pembantu dan 88 buah Poskesdes yang tersebar di wilayah kerja Puskemas. Diharapkan dengan adanya fasilitas pelayanan kesehatan tersebut dapat memudahkan akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

1.5 Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pejabat Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga orang Kepala Bidang, yaitu masing-masing dari Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan, Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit. Sekretaris membawahi dua sub bagian dan Kepala Bidang membawahi tiga orang Kepala Seksi. Disamping itu Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan memiliki 22 Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu 20 UPTD Puskesmas, UPTD Instalasi Farmasi, UPTD Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi, serta 2 rumah sakit yakni Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dan Rumah Sakit Umum Singasana. Dalam memimpin UPTD, Ka. UPTD dibantu masing-masing oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha sedangkan Rumah Sakit di Nyitdah dengan tipe C dikepalai oleh seorang Direktur dan dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha serta dua Kepala Bidang. Kepala Bagian Tata Usaha membawahi dua sub bagian dan masing-masing Kepala Bidang membawahi dua seksi. Selain itu Rumah Sakit Umum Daerah Tabanan dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu 3 orang

Wakil Direktur yakni Wadir Pelayanan dan Pengendalian Mutu, Wadir Penunjang, dan Wadir Operasional. Masing masing Wadir membawahi 2 bidang, sedangkan masing masing bidang membawahi 2 seksi.

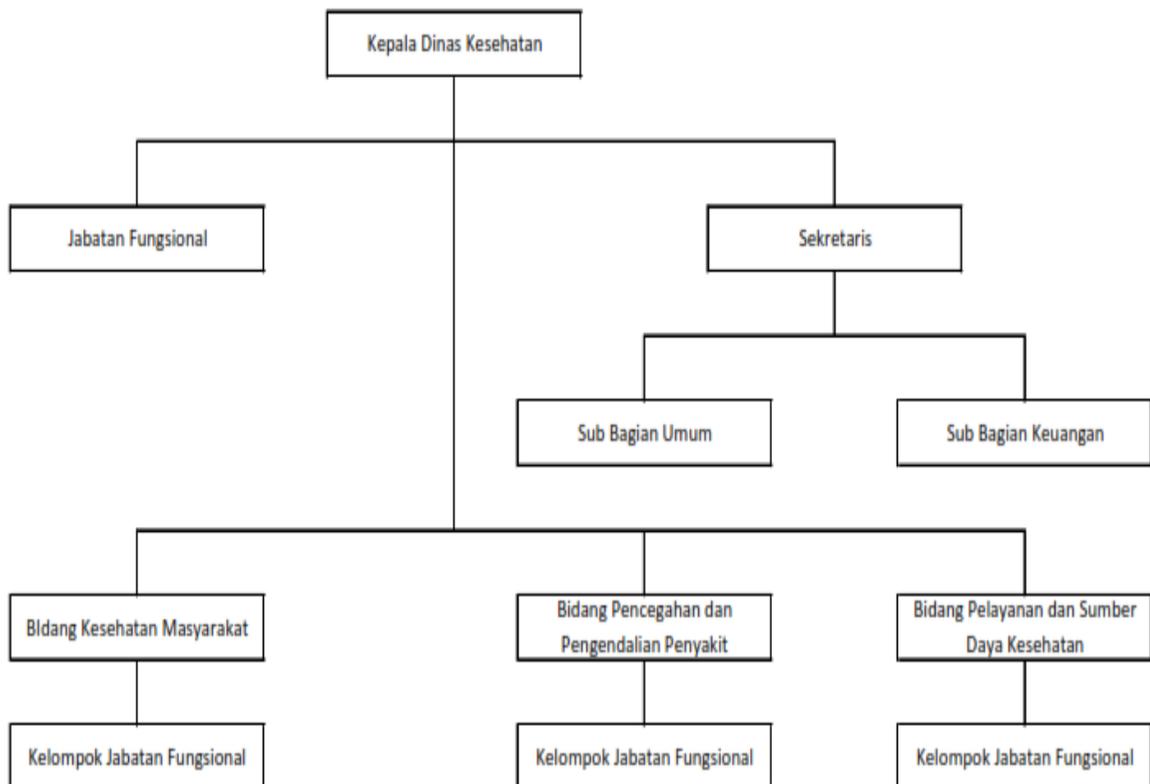
Tugas Pokok Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan sesuai dengan Peraturan Bupati Tabanan Nomor 104 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah melakukan urusan pemerintah kabupaten berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang urusan Kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang kesehatan, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai kewenangan bidang Kesehatan,
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Kesehatan
- c. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang kesehatan
- d. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas di bidang kesehatan,
- e. Pemberi perijinan sesuai bidang Kesehatan;
- f. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagan 1.1

Struktur Organisasi PD Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan



Sumber : Sub.Bag Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Adapun rincian uraian tugas Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, antara lain :

1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas:
 - a. memimpin dan mengkoordinasikan perumusan rencana dan program kerja dinas kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat;
 - c. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - d. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minumane.
 - e. perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan;
 - f. monitoring, evaluasi pelaksanaan dan capaian kinerja dinas kesehatan;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban
2. Sekretaris mempunyai tugas:
 - a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran dinas kesehatan;
 - b. koordinasi menyusun program kerja lingkup sekretariat;
 - c. koordinasi pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - d. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara/daerah;
 - e. pembinaan aparatur dan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian;
 - f. koordinasi monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran;
 - g. koordinasi dan pengelolaan data dan informasi serta publikasi;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - i. penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
 - j. koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - k. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan sekretaris dinas kesehatan; dan l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2.1 Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja subbagian umum;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha (persuratan, dokumentasi dan kearsipan);
 - c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan, urusan rumah tangga, barang milik negara/daerah, keamanan dan ketertiban kantor;
 - d. melaksanakan urusan kepegawaian dan pembinaan aparatur;

- e. menyiapkan bahan penanganan pengaduan masyarakat dan pelayanan publik;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- g. menyiapkan bahan sistem pengendalian intern pemerintah;
- h. melaksanakan fungsi publikasi dan hubungan masyarakat;
- i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan subbagian umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja sub bagian keuangan;
- b. menyusun perencanaan, program dan anggaran dinas kesehatan;
- c. menyiapkan koordinasi pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan penatausahaan keuangan;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengendalian kegiatan dan anggaran;
- f. menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan keuangan;
- g. menyiapkan bahan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang kesehatan masyarakat;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang kesehatan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan kegiatan pelaksanaan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas:

- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyusunan program kerja lingkup bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaksanaan kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten;
- d. pelaksanaan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten;

- e. pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi;
 - f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten;
 - g. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
5. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas:
- a. penyusunan perencanaan, program dan anggaran pada bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - b. penyusunan program kerja lingkup bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
 - c. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberian izin praktik tenaga kesehatan di wilayah kabupaten;
 - d. pelaksanaan kegiatan perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten;
 - e. pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah kabupaten;
 - f. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - g. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemberian sertifikat produksi untuk sarana produksi alat kesehatan kelas 1 tertentu dan perbekalan kesehatan rumah tangga kelas 1 tertentu perusahaan rumah tangga;
 - h. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga;
 - i. pelaksanaan kegiatan fasilitasi penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan Depot Air Minum (DAM);
 - j. pelaksanaan kegiatan penerbitan stiker pembinaan pada makanan jajanan dan sentra makanan jajanan;
 - k. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan postmarket pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga;
 - l. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

1.6 Isu-isu Strategis

Berdasarkan atas permasalahan yang telah diurai pada sub bab sebelumnya serta sinergis dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dengan adanya transisi epidemiologi penyakit menular yang bersifat global, penentuan isu-isu strategis dan rumusannya mengacu pada permasalahan dan kebutuhan pelayanan dibidang Kesehatan saat ini. Sehingga isu-isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan Kabupaten Tabanan dibidang Kesehatan kedepan sesuai dengan Pola Pembangunan Semesta Berencana adalah antara lain:

1. Belum Optimalnya Mutu Pelayanan Kesehatan
2. Masih tingginya jumlah penduduk yang belum menerima bantuan iuran JaminanKesehatan Nasional (JKN)
3. Capaian SPM bidang kesehatan belum 100 %.
4. Masih ditemukannya gizi buruk, stunting serta meningkatnya obesitas.
5. Masih ditemukannya penularan penyakit menular (TBC, HIV AIDS, DBD, Kusta) dan tingginya penduduk menderita penyakit tidak menular (Hipertensi, Diabetis Melitus, Kanker, Jantung).
6. Belum optimalnya kualitas lingkungan dan perilaku hidup bersih dan sehat.
7. Munculnya wabah Penyakit Menular Jenis Baru yang bersifat Global
8. Meningkatkan derajat sehat masyarakat melalui kegiatan preventif dan promotif dan memaksimalkan kesehatan tradisional.
9. Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan rujukan yang terintegrasi untuk memantau secara *realtime* derajat sehat masyarakat.

1.7 Sistematika Penyajian

Pada dasarnya laporan akuntabilitas kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan selama Tahun 2023. capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance agreements*) Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian LKjIP Kabupaten Tabanan Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

- Bab I–Pendahuluan : Memberikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.
- Bab II–Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2023.
- Bab III–Akuntabilitas Kinerja Tahun 2023,
 - a. Capaian Kinerja Organisasi, menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Kesehatan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
 - b. Realisasi Anggaran, menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- Bab IV–Penutup, menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Kesehatan serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan adanya pedoman dan dokumen perencanaan. Adapun pedoman yang akan dijadikan acuan di Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan adalah sebagai berikut :

1. RPJMD 2021-2026.
2. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023
4. Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.
5. Rencana Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.
6. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.
7. Pengukuran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2023.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026

RPJMD Kabupaten Tabanan telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2021-2026 yaitu merupakan dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah yang dirancang selama satu periode masa kepemimpinan Kepala Daerah / Bupati terpilih.

RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Tabanan 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada serentak tahun 2020 yang telah resmi dilantik pada tanggal 26 Februari 2021. I Komang Gede Sanjaya sebagai Bupati dan I Made Edi Wirawan sebagai Wakil Bupati untuk memimpin Tabanan dalam tiga tahun ke depan, periode 2021-2024. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”. AMAN bermakna untuk mewujudkan masyarakat Tabanan yang aman dan nyaman dalam perikehidupan. UNGGUL bertujuan untuk membangun masyarakat Tabanan yang memiliki kemampuan dan berdaya saing tinggi di segala bidang kehidupan, serta MADANI adalah mewujudkan masyarakat Tabanan yang memiliki kemandirian secara sosial-ekonomi di berbagai bidang yang berkepribadian dalam kebudayaan. Untuk mewujudkan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana di Kabupaten Tabanan

Menuju Tabanan Era Baru : Aman, Unggul, Madani (AUM)”, akan ditempuh dengan 3 (tiga) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Aman Dan Nyaman Dalam Perikehidupan (Aman)
 2. Membangun Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemampuan Dan Berdaya Saing Tinggi Di Segala Bidang Kehidupan (Unggul)
 3. Mewujudkan Masyarakat Tabanan Yang Memiliki Kemandirian Secara Sosial-Ekonomi Di Berbagai Bidang Yang Berkepribadian Dalam Kebudayaan (MADANI)
- Pelaksanaan pembangunan Tabanan dalam mewujudkan Visi Misi didasarkan atas 5

(lima) bidang prioritas yaitu :

1. Pangan, Sandang, dan Papan
2. Kesehatan dan Pendidikan
3. Jaminan Sosial dan Ketenagakerjaan
4. Adat, Tradisi, Seni dan Budaya
5. Pariwisata.

Kelima bidang di atas membutuhkan dukungan infrastruktur fisik maupun elektronik yang memadai dan tetap menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup yang memadai. Selaras dengan Pembangunan Semesta Berencana Bali, yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali Sad Kerthi yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (atma kerthi), penyucian laut (segara kerthi), penyucian sumber air (danu kerthi), penyucian tumbuh-tumbuhan (wana kerthi), penyucian manusia (jana kerthi) dan penyucian alam semesta (jagat kerthi) serta landasan filosofi Tri Hita Karana yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan alam. Pembangunan Semesta Berencana Tabanan menempatkan Sad Kerthi sebagai pondasi pembangunannya.

Dengan mengacu pada Tujuan dan sasaran tersebut dan mensinergikan isu-isu strategis dan prioritas pembangunan Kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan maka Dinas Kesehatan merumuskan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kesehatan di Kabupaten Tabanan dalam Renstra Dinas Kesehatan periode 2021-2026 selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD menjadi 2 Tujuan dan 2 sasaran yaitu :

- Tujuan 1 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD dengan
 - o Sasaran 1 : Meningkatnya sumber daya kesehatan sesuai standar
- Tujuan 2 : Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan di OPD dengan
 - o Sasaran 2 : Meningkatnya kinerja perangkat daerah.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 menyebutkan bahwa, Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada

pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Kesehatan adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2023 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke - 1 yang telah ditetapkan dalam RENSTRA PD Tahun 2021 – 2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023. Perjanjian kinerja Tahun 2023 tersebut merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh Indikator Kinerja.

Adapun tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja Tahun 2023, dapat digambarkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Perjanjian Kinerja dan Target Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Difinisi Operasional /Formula	Target	Satuan
1.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan		Persentase rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan	100	persen
2.		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah sumber daya kesehatan yang terpenuhi sesuai standar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	78,75	persen
3.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	A	Nilai PMPRB
4.		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	A	Nilai SAKIP

Berdasarkan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang dijabarkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana (RPJMD-SB) ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan tersebut diharapkan bernilai strategis dan memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja Dinas Kesehatan dalam mendukung pencapaian VISI DAN MISI Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabanan. Program-program yang dilaksanakan diharapkan dapat meningkatkan performa dan kinerja sesuai dengan tupoksinya adalah :

Tabel 2.2 Rincian Pendanaan Dinas Kesehatan Berdasarkan Program Pembangunan Tahun 2023

No	Program	Indikator	Difinisi Operasional / Formula	Target	Anggaran (Setelah Perubahan) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian upaya pelayanan kesehatan perorangan dan upaya pelayanan kesehatan masyarakat	79%	65.441.468.675
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi	Jumlah faskes milik pemerintah yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar dalam setahun per jumlah Faskes di Kabupaten Tabanan dikali 100%	55%	2.053.726.800
3	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan	Jumlah usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memenuhi standar perijinan dibagi Jumlah usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman dikali 100%	60%	407.766.000
4	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Desa Siaga Madya	Desa yang memenuhi klasifikasi desa siaga madya dibandingkan dengan seluruh desa yang ada (Desa yang memenuhi klasifikasi desa siaga aktif madya dibagi dengan jumlah seluruh desa yang ada kali 100 persen)	30%	774.027.200
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	Rata-rata capaian kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten Tabanan pada Dinas Kesehatan	100%	157.456.324.191
TOTAL ANGGARAN					226.133.312.866

Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5 Penyediaan Bahan/Materia
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.3 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.5 Pengadaan Obat, Vaksin
 - 1.6 Pengadaan Bahan Habis Pakai
 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

- 2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- 2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- 2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- 2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- 2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- 2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- 2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- 2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
- 2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- 2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
- 2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- 2.14 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
- 2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
- 2.16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- 2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
- 2.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
- 2.19 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
- 2.20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- 2.21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
- 2.22 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
- 2.23 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
- 2.24 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
- 2.25 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 2.26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- 2.27 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
- 2.28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 3.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 2.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
 - 3.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Untuk menggambarkan keterkaitan antara sasaran, indikator, program, kegiatan serta target-target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3. Sasaran, Indikator, Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	157,456,324,191
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	10,000,000
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	3 Dokumen	5,000,000
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	1 Laporan	5,000,000
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	145,880,671,750
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17524 orang/bulan	145,880,671,750
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	69,200,000
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen	69,200,000
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	322,503,500
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	20,000,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	77,000,000
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	22,503,500
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	3,000,000
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	120,000,000
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	80,000,000
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang tersedia	100%	50,000,000
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	50,000,000
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	10,803,948,941
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	12,000,000
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	352,616,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	32,000,000
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	10,407,332,941
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	320,000,000
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	190,000,000
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	70,000,000
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Sesuai kebutuhan	60,000,000
2	Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	79%	65,441,468,675
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	8,229,993,875
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit	373,125,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	1 Unit /Sesuai Kebutuhan	1,318,736,675
			Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 Unit	993,895,000
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	3 Unit	2,158,451,000
			Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	1 Paket	1,714,028,200
			Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	1 Paket	1,671,758,000
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	100%	56,856,904,800
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5643 Orang	127,090,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5387 Orang	12,660,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	52091 Orang	10,000,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	289769 Orang	10,000,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	131099 Orang	7,500,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5525 Orang	476,998,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	1362 Orang	5,000,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	3353 Orang	881,849,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	6963 Orang	299,250,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	4 Dokumen	12,250,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	223,848,200
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	2 Dokumen	71,752,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	2 Dokumen	259,950,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase subkegiatan yang didukung pelayanan promosi kesehatan	1 Dokumen	321,890,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	5,000,000
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	3 Dokumen	132,480,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase penderita GME dan Depresi pada penduduk \geq 15 tahun yang mendapatkan pelayanan	2769 orang	126,481,600
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan Penyalahgunaan napza	11 Orang	9,000,000
			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	1 Dokumen	32,800,000
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2,278,641,100
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	4 Dokumen	50,849,346,400
			Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Fasyankes dan sekolah yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza	309791 Orang	150,000,000
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	328,197,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	23 Unit	54,774,000
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	16,198,500
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	545 Orang	55,095,000
			Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1456 Orang	29,615,000
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	598 Orang	69,239,000
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar Perijinan	40%	354,570,000
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	26 Unit	5,000,000
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	21 Unit	349,570,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	55%	2,053,726,800
			Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	84%	10,000,000
			Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	10,000,000
			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja	95%	883,152,800
			Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	24 Dokumen	10,000,000
			Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	434 Orang	843,655,800
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	1 Dokumen	29,497,000
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR	98%	1,160,574,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	100 orang	1,160,574,000
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, alat kesehatan dan makanan mi-numan yang memenuhi standar perijinan	60%	407,766,000
			Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar	60%	101,598,000
			Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	50 Sarana	101,598,000
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	65%	155,050,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	2 Dokumen	155,050,000
			Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	60%	151,118,000
			Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	50 Unit	151,118,000
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	30%	774,027,200
			Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan	1 Dokumen	405,225,000
			Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	405,225,000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	65%	368,802,200
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	368,802,200
TOTAL ANGGARAN						226,133,312,866

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Tabanan tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara terperinci hal ini diuraikan secara nyata pada analisis capaian kinerja, sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas kinerja sekaligus sebagai pelaksanaan amanah dari Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

3.1.1 Penetapan Kinerja

Dokumen Penetapan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan yang berisi indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran setelah penetapan APBD 2023 yang menjadi acuan dalam pengukuran kinerja. Penetapan kinerja tersebut mencakup penetapan indikator kinerja dan target kinerja berdasarkan sasaran strategis yang akan dilaksanakan pada tahun tersebut (tahun ke N) sesuai dengan RPJMD.

3.1.2 Pengumpulan Data Kinerja.

Pengumpulan data kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dilakukan melalui sistem informasi kinerja yang mengintegrasikan data kinerja dengan data realisasi kinerja. Pengumpulan data mencakup realisasi seluruh indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan perjanjian Kinerja tahun 2023. Hasil pengumpulan data kinerja tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan target dalam dokumen Penetapan Perjanjian Kinerja dan dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja yang selanjutnya menjadi lampiran dalam LKjIP. Dari hasil evaluasi dapat diketahui kinerja yang mencapai dan yang tidak mencapai target untuk kemudian dilakukan analisis faktor-faktor yang mendukung dan atau yang menghambat pencapaian kinerja.

3.1.3 Metode/Cara Pengukuran Kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2023 dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai organisasi. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2023 mencakup indikator kinerja pada sasaran strategis. Kinerja sasaran strategis akan terlihat dari tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2023.

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- b. Apabila Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian rencana tingkat capaian, digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan diberlakukan nilai serta makna dengan kriteria berikut :

Capaian (%)	Kategori
85 - 100	Sangat Baik
70 - <85	Baik
55 - <70	Cukup
<55	Kurang

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diperlukan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Pengukuran indikator kinerja yang dilaksanakan adalah dengan membandingkan antara target kinerja sasaran dengan realisasi kinerja sasaran yang dihasilkan selama satu tahun. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis kinerja tersebut maka akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sekaligus memperoleh gambaran strategi- strategi apa yang harus dipersiapkan pada tahun-tahun mendatang dalam upaya peningkatan kinerja guna tercapainya sasaran dan tujuan suatu organisasi.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Definisi Operasional /Formula	Capaian Tahun 2022	2023			Target Akhir Tahun Renstra 2026	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
						Target	Realisasi	Capaian (%)		
1.	Terwujudnya Pemenuhan Hak Dasar Kesehatan		Persentase rata-rata Capaian SPM Kesehatan	Rata-rata Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Tabanan	79,5%	100%	90,2%	90,2%	100%	90,2%
2.		Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar	Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar	Jumlah sumber daya kesehatan yang terpenuhi sesuai standar pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dibagi jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan	83,3%	78,75%	87,5%	111%	81%	108%
3.	Terwujudnya kualitas tata kelola pemerintah di OPD		Hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Hasil Evaluasi Inspektorat	93,31 (AA)	A	Pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian PMPRB	Pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian PMPRB	A	-
4.		Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Hasil Evaluasi Inspektorat	80,85 (A)	A	Belum dilakukan penilaian	Belum dilakukan penilaian	A	Belum dilakukan penilaian

3.2.1 Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023 dan Tahun Sebelumnya Dengan Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021 s/d 2026

Dinas Kesehatan bertugas dalam melaksanakan sasaran : Terjaminnya Pemenuhan Hak Pelayanan Dasar Warga khususnya bidang kesehatan. Dimana indikatornya adalah Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Penerapan SPM sebagaimana dimaksud diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

SPM Bidang Kesehatan merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

Capaian rata rata SPM Kesehatan di Kabupaten Tabanan pada tahun 2023, sebesar 90,2%. Nilai ini masih berada di bawah target yang telah ditetapkan yakni 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022 sebesar 79,5%, pada capaian total SPM pada tahun 2023 telah mengalami peningkatan.

Sedangkan indikator kinerja pada sasaran : Meningkatnya Sumber Daya Kesehatan sesuai standar adalah Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar. Pada tahun 2022 capaian Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar adalah sebesar 83,3%, dan pada tahun 2023 telah mengalami peningkatan yakni 87,5%.

Untuk penilaian Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Tabanan yang berpedoman kepada Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dalam laporan tersebut harus memenuhi aspek Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi, disamping harus adanya sinkronisasi antara aspek-aspek tersebut.

Penilaian LKJIP dilaksanakan maksimal 2 bulan setelah tahun anggaran selesai, dan pada saat laporan ini dibuat, belum dilaksanakan evaluasi LKJIP oleh inspektorat kabupaten Tabanan. Sedangkan pada tahun 2022 nilai LKjIP yang dicapai Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan adalah 80,85 (A). Nilai tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan yakni A. Dalam salah satu komponen penilaian LKjiP adalah telah digunakannya aplikasi dalam penilaian kinerja, sementara pada Kabupaten Tabanan belum memiliki aplikasi tersebut. Hal ini telah ditindaklanjuti dengan mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Dinas Kominfo agar membuat aplikasi dalam penilaian kinerja perangkat daerah.

Sedangkan untuk penilaian PMPRB yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten Tabanan, dengan penilaian PMPRB ini akan memberikan gambaran dalam rangka mengupayakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Namun pada tahun 2023 tidak dilakukan penilaian PMPRB.

3.2.2 Analisis keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi.

Pencapaian kinerja untuk indikator sasaran pada tahun 2023 yakni : Persentase Sumber Daya Kesehatan yang terpenuhi sesuai standar sudah cukup bagus, meskipun masih juga terdapat beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya indikator sasaran tersebut secara optimal. Keberhasilan ini tidak terlepas dari penyebab internal dan eksternal. Adapun penyebab internal yang dimaksudkan antara lain ;

1. Telah adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari baik dari pimpinan dan masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan sebelumnya.
2. Perencanaan dari masing-masing kegiatan telah fokus pada apa yang akan dicapai dan tidak hanya fokus pada tindakan.
3. Telah diimplementasikannya penganggaran yang berbasis kinerja, dimana setiap tindakan atau anggaran yang dikeluarkan, diharapkan dapat menghasilkan sesuatu.
4. Telah dilaksanakannya rapat evaluasi setiap triwulan dalam pelaksanaan kegiatan baik terkait realisasi anggaran maupun realisasi fisiknya, untuk mengantisipasi terdapatnya

kegiatan yang tidak fokus pada hasil. Dan hasil dari rapat tersebut dijadikan acuan dalam perbaikan perbaikan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

5. Semakin optimalnya penyebaran informasi kesehatan melalui sosial media.

Sementara penyebab eksternal terhadap keberhasilan pencapaian program/ kegiatan yang kami maksudkan antara lain :

1. Adanya koordinasi yang baik dengan OPD lain yang berkaitan dengan bidang kesehatan.
2. Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari Pemda Kabupaten Tabanan dalam memberikan bimbingan dan konsultasi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan.
3. Adanya sinergitas program/ kegiatan yang telah direncanakan dengan program dari OPD-OPD teknis di lingkungan Pemda Kabupaten Tabanan.

Selain terdapatnya penyebab eksternal dan internal yang mendukung keberhasilan kinerja, juga dimungkinkan terdapat beberapa penyebab yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan. Pada indikator rata rata capaian SPM Kesehatan dan nilai LKjIP belum mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun penyebab kegagalan dan alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain :

1. Sasaran yang diberikan oleh pusdatin kemenkes tinggi. Untuk beberapa jenis layanan kondisi di lapangan tidak dapat memenuhi sasaran tersebut. Contohnya : ODGJ yang ditemukan pada pelayanan ODGJ sebanyak 1.064 namun target penemuan oleh pusdatin sebesar 1362 sehingga capaian hanya mencapai 78,1%
2. Tingginya mobilitas penduduk yang menyebabkan adanya missed data pada saat pendataan.
3. Adanya kepercayaan yang masih dipegang masyarakat sehingga menyulitkan pemberian pelayanan. Contohnya : pemeriksaan kehamilan baru dilakukan ketika umur kehamilan sudah di atas 3 bulan, dan bayi yang baru diijinkan keluar rumah setelah 3 bulan sehingga pelayanan tidak mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir.
4. Masih kurangnya SDM kesehatan yang tersedia di fasilitas kesehatan untuk pelaksanaan program penjangkaran.
5. Masih adanya stigma di masyarakat terhadap penyakit tertentu sehingga tidak mau memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan

Sebagai solusi alternatif untuk mengurangi dampak-dampak yang diakibatkan oleh permasalahan-permasalahan tersebut diatas telah dilaksanakan beberapa solusi antara lain :

1. Melakukan penghitungan ulang terhadap sasaran dari SPM. Berdasarkan Permendagri No 59 Tahun 2021, Perangkat Daerah menghitung Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar Warga Negara Secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar

dan Mutu Pelayanan Dasarnya. Warga Negara yang berhak menerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan:

- miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- sifat barang dan/atau jasa yang tidak dapat diakses atau dijangkau sendiri;
- kondisi bencana; dan/atau
- kondisi lain yang tidak memungkinkan untuk dapat dipenuhi sendiri.

Dengan adanya payung hukum tersebut, maka sasaran terhadap SPM Kesehatan akan difokuskan pada penduduk yang tidak mampu tersebut dengan tanpa mengesampingkan pelayanan bagi masyarakat diluar kriteria tersebut yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

2. Dinas Kesehatan juga tetap melakukan upaya dalam pemenuhan SDM Kesehatan melalui pengusulan penambahan tenaga kesehatan guna mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan. Dimana pada tahun ini dilakukan perekrutan PPPK Kesehatan
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodic.
4. Peningkatan pengetahuan kepada masyarakat melalui promosi kesehatan, agar masyarakat mendapatkan informasi yang benar terkait pelayanan kesehatan dan meluruskan stigma yang salah terhadap suatu penyakit.
5. Pengimplementasian penilaian kinerja PNS melalui penerapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
6. Melakukan optimalisasi sumber daya yang tersedia dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

3.2.3 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung indicator kinerja dibedakan menjadi dua yaitu efisiensi sumber daya manusia dan sumber daya berupa biaya. Dari sisi sumber daya manusia banyak hal-hal yang terjadi penghematan, penggunaan media komunikasi secara daring dan pemanfaatan yang lebih optimal terhadap peran tenaga kesehatan dalam pendampingan, koordinasi dan evaluasi program kesehatan.

Untuk menghitung efisiensi sumber daya pada biaya dapat menggunakan rumus :

$$\text{Persentase efisiensi Biaya} = \frac{100\% - [\text{Realisasi Biaya} \times 100\%]}{\text{Target Biaya}}$$

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk semua program adalah Rp. 214.535.247.699,00, sementara target biaya untuk semua program yaitu Rp. 226.133.312.866,00. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya pada level program adalah 5.12%. Efisiensi ini timbul sebagai akibat dari penggunaan media social sebagai salah satu alat penyebar informasi, serta alat penyimpanan elektronik yang dapat mengurangi biaya/cost pada

pencetakan dan penggandaan, dan ada pula penawaran harga pada proses pengadaan barang dan jasa yang mendukung adanya efisiensi biaya.

3.2.4 Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pada tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melaksanakan 5 program, 18 Kegiatan dan 64 sub kegiatan untuk menopang ke dua sasaran utama yang menjadi Indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan. Adapun rincian kegiatan/ Sub Kegiatan setiap program tersebut adalah sebagai berikut :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 - 4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 4.1 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4.2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4.4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 4.5 Penyediaan Bahan/Materia
 - 4.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 7.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- B. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
 - 1.2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 1.3 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.4 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - 1.5 Pengadaan Obat, Vaksin
 - 1.6 Pengadaan Bahan Habis Pakai
 - 2. Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - 2.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - 2.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - 2.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - 2.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - 2.6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - 2.7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
 - 2.8 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - 2.9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - 2.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
 - 2.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - 2.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - 2.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - 2.14 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
 - 2.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
 - 2.16 Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - 2.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - 2.18 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - 2.19 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
 - 2.20 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - 2.21 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - 2.22 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - 2.23 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - 2.24 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

- 2.25 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
- 2.26 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis
- 2.27 Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)
- 2.28 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria
- 3. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
 - 3.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
- C. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1. Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
 - 2. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 2.2 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 2.3 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 3. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- D. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 1. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 1.1 Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - 2. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 2.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
 - 3. Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

- 3.1 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
- E. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

Adapun data capaian kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan tahun 2023 dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 3.2 Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	77.51%	100%	99.84%	99.84%	Sangat Baik
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang dihasilkan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Baik
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	94%	100%	98.89%	98.89%	Sangat Baik
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	94%	17524 orang/bulan	17330 Orang/bulan	98.89%	Sangat Baik
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	96%	3 Paket	3 paket	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	51%	1 paket	1 paket	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	44%	1 paket	1 Paket	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	49%	1 paket	1 paket	100%	Sangat Baik
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 laporan	1 laporan	100%	Sangat Baik
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi PD yang tersedia	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7%	2 Unit	2 Unit	100%	Sangat Baik
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	99%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	Sangat Baik
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD	100%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	45%	25 Unit	25 Unit	100%	Sangat Baik
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	58%	20 Unit	20 Unit	100%	Sangat Baik
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	91%	79%	74%	94%	Sangat Baik
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan pemerintah yang mampu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	96%	100%	100%	100%	Sangat Baik
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	70%	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Baik
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	0%	1 Unit /Sesuai Kebutuhan	1 Unit /Sesuai Kebutuhan	100%	Sangat Baik
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	108%	2 Unit	2 Unit	100%	Sangat Baik
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	120%	3 Unit	3 Unit	100%	Sangat Baik
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	50%	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Baik
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	78%	1 Paket	1 Paket	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jenis layanan kesehatan yang mampu dilayani secara prima	91%	100%	87%	87%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	80%	5643 Orang	4903 Orang	86.9%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	67%	5387 Orang	4582 Orang	85.1%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	52091 Orang	51448 Orang	98.8%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	49%	289769 Orang	195592 Orang	67.5%	Cukup
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	61%	131099 Orang	55850 Orang	42.6%	Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100%	5525 Orang	8752 Orang	158.4%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	100%	1362 Orang	1064 Orang	78.1%	Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	76%	3353 Orang	3988 Orang	118.9%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	62%	6963 Orang	5717 Orang	82.1%	Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	51%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	112%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	13%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	75%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Persentase subkegiatan yang didukung pelayanan promosi kesehatan	117%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Persentase penderita GME dan Depresi pada penduduk \geq 15 tahun yang mendapatkan pelayanan	20%	2769 orang	2769 orang	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan Deteksi dini masalah kesehatan jiwa dan Penyalahgunaan napza	20 Puskesmas	11 Orang	10 Orang	91%	Sangat Baik
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus	69%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	99%	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Fasyankes dan sekolah yang melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan Napza	8 (Faskes/Sekolah)	309791 Orang	35322 Orang	11%	Kurang
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	154%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	96%	23 Unit	23 Unit	100%	Sangat Baik
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5%	1 Unit	1 Unit	100%	Sangat Baik
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	545 Orang	299 Orang	55%	Cukup
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1456 Orang	96 Orang	7%	Kurang
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	-	598 Orang	321 Orang	54%	Kurang
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi Standar Perijinan	100%	40%	40%	100%	Sangat Baik
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	20%	26 Unit	17 Unit	65%	Cukup

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	84%	21 Unit	21 Unit	100%	Sangat Baik
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase fasilitas kesehatan milik pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki jenis dan jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar	91%	55%	55%	100%	Sangat Baik
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	78%	84%	84%	100%	Sangat Baik
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	70%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah Kabupaten Tabanan yang memiliki dokumen perencanaan Kebutuhan SDM berdasarkan analisis beban kerja	100%	95%	95%	100%	Sangat Baik
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	83%	24 Dokumen	24 Dokumen	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	83%	434 Orang	35 Orang	8%	Kurang
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan pada Fasilitas pelayanan Kesehatan yang memenuhi standar	65%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR	70%	98%	98%	100%	Sangat Baik
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis	2%	100 orang	86 Orang	86%	Sangat Baik
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase usaha farmasi, alat keseha-tan dan makanan minuman yang meme-nuhi standar perijinan	78%	60%	60%	100%	Sangat Baik
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki ijin sesuai standar	100%	60%	60%	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	200%	50 Sarana	27 Sarana	54%	Kurang
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga yang bersertifikat	98%	65%	65%	100%	Sangat Baik
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	178%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut	86%	60%	60%	100%	Sangat Baik
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	65%	50 Unit	34 Unit	100%	Sangat Baik
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa Siaga Madya	31%	30%	30%	100%	Sangat Baik
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Publik yang di buat di bidang kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Keterangan
				Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi Kinerja (%)	
2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikembangkan	49%	65%	65%	100%	Sangat Baik
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	80%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Sangat Baik

3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama 2023

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. Berikut merupakan capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan Tahun 2023

Tabel 3.3 Capaian IKU berdasarkan RPJMD 2021-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KONDISI AWAL (2022)	TARGET KINERJA (2023)	CAPAIAN KINERJA (2023)
1	Angka Harapan Hidup	74.25	74.50	74,48
2	Indeks Kepuasan Pasien	85%	87%	85,78%
3	Indeks Keluarga Sehat	0.45	0.5	0,47
4	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	BB	A	Tahun 2023 belum dilakukan penilaian
5	Nilai LKJIP Dinas Kesehatan	BB	A	Tahun 2023 tidak dilakukan penilaian

Angka/Umur Harapan Hidup (AHH/UHH) secara definisi adalah perkiraan rata-rata lamanya hidup yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk dari sejak lahir. AHH dapat dijadikan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah pada keberhasilan pembangunan kesehatan serta sosial ekonomi di suatu wilayah, termasuk di dalamnya derajat kesehatan. Data AHH diperoleh melalui survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Selain Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Harapan Hidup (AHH) juga digunakan untuk menilai derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, baik kabupaten, provinsi, maupun negara. AHH juga menjadi salah satu indikator yang diperhitungkan dalam menilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Adanya perbaikan pada pelayanan kesehatan melalui keberhasilan pembangunan pada sector kesehatan dapat diindikasikan dengan adanya peningkatan angka harapan hidup saat lahir. Angka harapan hidup Kabupaten Tabanan pada tahun 2023 sebesar 74,48. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 74,25 pada tahun 2022. Namun jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 belum mencapai target.

Indeks Kepuasan Pasien adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pasien yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat pasien dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Indeks kepuasan pasien di Dinas Kesehatan Kabupaten

Tabanan pada tahun 2023 adalah 85,78%. Nilai tersebut telah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yakni 85%. Namun jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan, capaian tahun 2023 belum mencapai target 87%.

IKS adalah Indeks Keluarga Sehat yang perhitungannya diambil dari rekapitulasi data dari 12 indikator yang diambil datanya dan hasilnya dibagi menjadi 3, yaitu : 1) Keluarga Sehat, bila $IKS > 0,800$; 2) Keluarga Pra Sehat, bila $IKS = 0,500-0,800$; 3) Keluarga Tidak Sehat, bila $IKS < 0,500$. Pendataan keluarga dilakukan terhadap seluruh keluarga dalam wilayah kerja Puskesmas dengan menggunakan formulir pengumpulan data untuk Prokesga. Prokesga berisi data di tingkat keluarga dan data dari semua individu anggota keluarga tersebut (sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga). Data yang dicatat minimal data dari 12 indikator tersebut di atas. Sesuai kondisi daerah, Prokesga dapat dikembangkan sehingga mencakup indikator-indikator lain yang dianggap penting di daerah tersebut. Dengan demikian, data yang dicatat bisa relatif lengkap sesuai kebutuhan daerah. Indikator keluarga Sehat meliputi :

1. Keluarga mengikuti program KB
2. Persalinan di Fasilitas Kesehatan
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap
4. Bayi mendapat ASI eksklusif
5. Pertumbuhan Balita dipantau
6. Penderita TB paru berobat sesuai standar
7. Penderita hipertensi berobat teratur
8. Penderita gangguan jiwa tidak ditelantarkan dan diobati
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok
10. Keluarga sudah menjadi anggota JKN
11. Keluarga mempunyai sarana air bersih
12. Keluarga menggunakan jamban sehat

Capaian indeks keluarga sehat pada tahun 2023 mencapai nilai 0,47 dalam kategori tidak sehat, nilai tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yakni 0,5. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian indeks keluarga sehat juga telah mengalami peningkatan yakni 0,45.

3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016-2021, Dinas Kesehatan telah menetapkan rencana kerja pada tahun 2023 yang telah dilakukan melalui program dan kegiatan. Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Pada Dinas Kesehatan Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	154,887,958,191	157,456,324,191	151,330,176,368	96.1%	6,126,147,823
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000	10,000,000	7,712,250	77.1%	2,287,750
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	3,988,100	79.8%	1,011,900
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	3,724,150	74.5%	1,275,850
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	145,880,671,750	145,880,671,750	140,242,093,731	96.1%	5,638,578,019
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	145,880,671,750	145,880,671,750	140,242,093,731	96.1%	5,638,578,019
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	69,200,000	69,200,000	54,745,852	79.1%	14,454,148
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	69,200,000	69,200,000	54,745,852	79.1%	14,454,148
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	295,503,500	322,503,500	265,507,462	82.3%	56,996,038
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20,000,000	20,000,000	17,639,064	88.2%	2,360,936
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50,000,000	77,000,000	73,575,672	95.6%	3,424,328
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22,503,500	22,503,500	11,834,485	52.6%	10,669,015
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	3,000,000	-	0.0%	3,000,000
	Penyediaan Bahan/Material	120,000,000	120,000,000	95,307,200	79.4%	24,692,800
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80,000,000	80,000,000	67,151,041	83.9%	12,848,959

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50,000,000	50,000,000	46,500,000	93.0%	3,500,000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	50,000,000	46,500,000	93.0%	3,500,000
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8,342,582,941	10,803,948,941	10,422,187,561	96.5%	381,761,380
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100.0%	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	260,000,000	352,616,000	267,067,204	75.7%	85,548,796
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32,000,000	32,000,000	16,346,725	51.1%	15,653,275
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8,038,582,941	10,407,332,941	10,126,773,632	97.3%	280,559,309
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240,000,000	320,000,000	291,429,512	91.1%	28,570,488
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190,000,000	190,000,000	162,307,955	85.4%	27,692,045
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50,000,000	70,000,000	69,501,376	99.3%	498,624
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	60,000,000	59,620,181	99.4%	379,819
B	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	65,648,565,775	65,441,468,675	60,588,998,138	92.6%	4,852,470,537
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9,500,488,875	8,229,993,875	5,944,858,399	72.2%	2,285,135,476

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	373,125,000	373,125,000	201,204,670	53.9%	171,920,330
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1,318,736,675	1,318,736,675	1,268,805,244	96.2%	49,931,431
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	993,895,000	993,895,000	617,860,000	62.2%	376,035,000
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2,158,451,000	2,158,451,000	2,041,919,986	94.6%	116,531,014
	Pengadaan Obat, Vaksin	1,743,525,200	1,714,028,200	1,045,933,792	61.0%	668,094,408
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	2,912,756,000	1,671,758,000	769,134,707	46.0%	902,623,293
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,793,506,900	56,856,904,800	54,446,252,839	95.8%	2,410,651,961
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	51,852,000	127,090,000	85,295,500	67.1%	41,794,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	140,850,000	12,660,000	8,880,000	70.1%	3,780,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	285,440,000	-	-	0.0%	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	69,379,000	-	-	0.0%	-
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	17,040,000	10,000,000	8,483,500	84.8%	1,516,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16,400,000	10,000,000	8,383,500	83.8%	1,616,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	63,002,000	-	-	0.0%	-

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	7,500,000	7,500,000	6,477,750	86.4%	1,022,250
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	7,500,000	476,998,000	354,281,669	74.3%	122,716,331
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	178,480,000	5,000,000	2,511,250	50.2%	2,488,750
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	445,309,000	881,849,000	163,342,020	18.5%	718,506,980
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	197,250,000	299,250,000	239,822,500	80.1%	59,427,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	295,780,000	12,250,000	-	0.0%	12,250,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	263,976,900	223,848,200	205,483,600	91.8%	18,364,600
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	71,752,000	71,752,000	67,555,600	94.2%	4,196,400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	273,060,000	259,950,000	147,514,450	56.7%	112,435,550
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	-	321,890,000	279,546,500	86.8%	42,343,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	5,000,000	5,000,000	4,581,000	91.6%	419,000
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	150,620,000	132,480,000	84,801,520	64.0%	47,678,480
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	-	126,481,600	100,609,950	79.5%	25,871,650
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	9,000,000	9,000,000	8,673,750	96.4%	326,250
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	32,800,000	32,800,000	4,502,400	13.7%	28,297,600

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1,659,051,100	2,278,641,100	1,790,061,924	78.6%	488,579,176
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	50,849,346,400	50,849,346,400	50,315,941,100	99.0%	533,405,300
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.0%	-
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	328,197,000	328,197,000	270,141,232	82.3%	58,055,768
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	54,774,000	54,774,000	8,813,200	16.1%	45,960,800
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	16,198,500	16,198,500	12,384,624	76.5%	3,813,876
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis	55,095,000	55,095,000	43,262,000	78.5%	11,833,000
	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Orang Dengan HIV (ODHIV)	29,615,000	29,615,000	20,509,600	69.3%	9,105,400
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	69,239,000	69,239,000	54,392,700	78.6%	14,846,300
3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	354,570,000	354,570,000	197,886,900	55.8%	156,683,100
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	5,000,000	5,000,000	4,391,600	87.8%	608,400
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	349,570,000	349,570,000	193,495,300	55.4%	156,074,700
C	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1,581,655,800	2,053,726,800	1,562,678,969	76.1%	491,047,831
1	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	10,000,000	10,000,000	7,499,000	75.0%	2,501,000
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	10,000,000	10,000,000	7,499,000	75.0%	2,501,000

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	776,855,800	883,152,800	751,216,469	85.1%	131,936,331
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	10,000,000	10,000,000	7,283,200	72.8%	2,716,800
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	766,855,800	843,655,800	717,410,270	85.0%	126,245,530
	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-	29,497,000	26,522,999	89.9%	2,974,001
3	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794,800,000	1,160,574,000	803,963,500	69.3%	356,610,500
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	794,800,000	1,160,574,000	803,963,500	69.3%	356,610,500
D	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	392,766,000	407,766,000	336,554,687	82.5%	71,211,313
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,598,000	101,598,000	79,996,800	78.7%	21,601,200
	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	86,598,000	101,598,000	79,996,800	78.7%	21,601,200
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155,050,000	155,050,000	145,793,187	94.0%	9,256,813

NO	PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN	PAGU INDUK	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN	%	SISA ANGGARAN
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	155,050,000	155,050,000	145,793,187	94.0%	9,256,813
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	151,118,000	151,118,000	110,764,700	73.3%	40,353,300
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	151,118,000	151,118,000	110,764,700	73.3%	40,353,300
E	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	820,731,100	774,027,200	716,839,537	92.6%	57,187,663
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	663,905,000	405,225,000	397,304,387	98.0%	7,920,613
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	663,905,000	405,225,000	397,304,387	98.0%	7,920,613
2	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	63,210,000	-	-	0.0%	-
	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	63,210,000	-	-	0.0%	-
3	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93,616,100	368,802,200	319,535,150	86.6%	49,267,050
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	93,616,100	368,802,200	319,535,150	86.6%	49,267,050
		223,331,676,866	226,133,312,866	214,535,247,699	94.9%	11,598,065,167

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023, serta Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) terdiri dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tabanan, Rencana Kerja Tahunan dan penetapan Capaian Kinerja. Disamping hal tersebut yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan capaian kinerja dengan data-data yang akurat, melakukan evaluasi kinerja dan melakukan analisis akuntabilitas

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 2023, dari 64 sub kegiatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan, sebanyak 53 indikator mencapai kategori sangat baik, 2 indikator sub kegiatan mencapai kategori baik, 3 indikator sub kegiatan mencapai kategori cukup, dan 6 indikator sub kegiatan mencapai kategori kurang.

Adapun keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan yang berlaku dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Keberhasilan yang telah tercapai di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan antara lain semakin meningkatnya kualitas kerja para pegawai yang membawa dampak kepada peningkatan kualitas kinerja pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya. Hasil analisis terhadap keberhasilan pencapaian realisasi target kinerja dipengaruhi oleh banyak faktor, baik dari internal maupun external, namun dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki, Dinas Kesehatan Tabanan mampu memaksimalkan potensi sumber daya tersebut. Sehingga potensi yang dimiliki mampu mendukung ketercapaian realisasi target indikator kinerja tersebut. Adapun hambatan maupun kendala yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran, dijadikan sebagai isu strategis yang

akan diselesaikan bersama oleh semua pihak manajemen di lingkungan Dinas Kesehatan Tabanan, dan ini menjadi tantangan yang harus ditangani dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian di atas maka berikut ini disampaikan beberapa saran untuk meningkatkan pencapaian hasil kegiatan, program maupun kebijaksanaan dimasa yang akan datang :

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan pelaksanaan program kegiatan di Kantor Dinas Kesehatan;
2. Keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu dilakukan untuk mendukung keakuratan dan keabsahan data didalam dokumen LKJIP;
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang telah disusun menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan pemerintahan khususnya di Kantor Dinas Kesehatan, dan dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya.

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dan menjadi bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabanan untuk dijadikan bahan acuan dalam perbaikan dimasa yang akan datang.